

BAB V

PENUTUP

Tidak dapat dipungkiri bahwa abad ke-21 ini memunculkan tantangan sekaligus peluang bagi hubungan internasional. Ini menyebabkan negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia bersaing dari berbagai aspek supaya tidak tertinggal dalam dinamika politik yang selalu berubah-ubah. Terpilihnya Presiden Jokowi serta kebijakan *inward looking* yang lebih memprioritaskan pembangunan dalam negeri merupakan langkah awal mengembalikan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim. Meskipun dalam prosesnya, tentu saja Indonesia menghadapi ancaman keamanan yang berpotensi terjadi di laut dan tidak dapat diabaikan begitu saja oleh Indonesia. Sudah sepatutnya Indonesia sebagai pemimpin dari ASEAN berinisiatif untuk mengatasi segala ancaman di bidang maritim demi terwujudnya bangsa maritim yang berdaulat bagi kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal Indonesia mengajukan perjanjian Indo-Pasifik sekaligus juga membahas perubahan politik Indonesia yang setelah era Soekarno berakhir berorientasi pada darat hingga era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono serta bagaimana posisi strategis Indonesia membuat Indonesia mengeluarkan geopolitik Poros Maritim Dunia.

Indo-Pasifik pertama kali dibahas oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2007 dalam pidatonya ke parlemen India. Namun dalam konsep yang lebih luas, konsep Indo-Pasifik dalam perjanjian Indo-Pasifik sederhananya adalah menggabungkan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena posisi geopolitik Indonesia berada tepat di tengah-tengah kedua samudra tersebut serta memiliki sebagian besar perairan di Asia Tenggara, ini menjadikan Indonesia harus aktif berperan sebagai pemimpin dari kawasan.

Perjanjian Indo-Pasifik sengaja dimunculkan agar dapat membangun hubungan kerja sama yang baik antar negara se-kawasan. Sejatinya perjanjian Indo-Pasifik bukanlah untuk menciptakan mekanisme baru, namun memanfaatkan mekanisme yang ada seperti forum *East Asia Summit* dalam rangka penyelesaian sengketa secara damai tanpa harus mengangkat senjata. Agar hubungan itu dapat terwujud, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menyelesaikan sengketa yang berada di wilayah Indo-Pasifik. Permasalahan yang saat ini sedang terjadi di Indo-Pasifik adalah masalah di semenanjung Korea pasca perang dingin, sengketa Laut Cina Selatan, ketegangan bilateral antar negara-negara di Asia Timur, sengketa perbatasan antar beberapa negara di Asia Tenggara, gerakan terorisme, perdagangan narkoba, serta penyelundupan manusia. Selama permasalahan tersebut masih berlanjut, akan sulit untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan karena keberhasilan perjanjian ini bergantung pada sikap masing-masing negara di kawasan.

Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Indo-Pasifik yang telah mengalami peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan yang cukup signifikan. Indonesia memiliki kepentingan untuk mempertahankan kondisi Indo-Pasifik yang tetap kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasionalnya, oleh karena itu Indonesia tidak bisa membiarkan situasi politik, ekonomi dan keamanan kawasan ditentukan semata-mata oleh negara-negara lain. Gagasan Marty Natalegawa mengenai perjanjian Indo-Pasifik mendapat dukungan karena maknanya dinilai sesuai dengan gagasan awal pembentukannya, yaitu menekankan pada penyelesaian masalah tanpa berperang. Di antaranya dikatakan bahwa Perjanjian Indo-Pasifik dikonsepsikan untuk menjadi mekanisme pembangunan norma dan prinsip bagi sebuah kawasan yang senantiasa berubah dan diharapkan dengan Perjanjian Indo-Pasifik ini akan bisa menciptakan keamanan bersama yang dihasilkan dengan tidak mengorbankan pihak-pihak lain yang ada di dalam kawasan tersebut. Tujuan gagasan Perjanjian Indo-

Pasifik yakni berkontribusi dalam perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan rasa percaya dan menyelesaikan sengketa dengan cara damai; menawarkan mekanisme untuk pencegahan dan resolusi konflik; menjadi alternatif dari kompetisi kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik; serta bertujuan agar negara-negara di kawasan akan mulai berpikir tentang diri mereka sebagai anggota komunitas yang bertanggung jawab untuk keamanan bersama.

Menilik dari sudut pandang perubahan politik luar negeri, tentulah sebuah kebijakan harus menyesuaikan dengan tantangan serta peluang yang ada. Selama ini, dari era Soeharto hingga era Susilo Bambang Yudhoyono, pembangunan dalam negeri lebih berorientasi ke darat serta membuat Indonesia lebih aktif di kancah global sehingga membuat laut menjadi terbelengkalai dan tidak lagi diprioritaskan selepas pemerintahan Soekarno. Padahal secara perhitungan, kawasan perairan Indonesia merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam dan diincar oleh banyak negara baik luar maupun dalam kawasan terbukti dari banyaknya kapal-kapal asing yang melakukan pencurian di laut dan banyaknya kapal yang ditenggelamkan oleh menteri Susi, sangat disayangkan jika *resources* di laut tidak dimanfaatkan dengan baik. Barulah saat Jokowi diangkat menjadi Presiden, perlahan ia mengembalikan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim yang berdaulat dengan mengeluarkan kebijakan *inward-looking* yang membuat Indonesia lebih fokus pada pembangunan ekonomi negara dengan laut sebagai basis sehari-hari.

Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia mencetuskan “diplomasi membumi” atau biasa disebut dengan sebutan “diplomasi pro-rakyat” dimana Indonesia akan lebih fokus pada isu-isu dalam negeri. Kebijakan ini akan lebih condong pada mengurus masalah-masalah domestik dibandingkan pemerintahan sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menekankan pada penguatan peran Indonesia di kawasan dengan slogan “ribuan teman, nol musuh”. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan tiga arah penting

sebagai turunan dari kebijakan luar negeri pro-rakyat. Pertama, memperkuat ekonomi Indonesia melalui kegiatan diplomasi. Untuk mencapainya, harus ada hubungan timbal balik antara kebijakan luar negeri dan kebijakan pembangunan ekonomi. Kedua, aktif dalam melakukan mekanisme bilateral sebagai instrumen diplomatik daripada forum multilateral. Ketiga, memungkinkan pakar hubungan internasional untuk lebih aktif dalam mempromosikan keunggulan kompetitif Indonesia secara ekonomi.

Persaingan politik antar negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, India dan Jepang memiliki kepentingan untuk memperebutkan akses kendali di rute pelayaran samudera Hindia dan samudera Pasifik atas 3 hal: jalur pelayaran, pasar, dan sumber daya alam di laut. Negara-negara besar itu juga memiliki kekuatan yang cukup besar untuk bisa bersaing di kancah regional dan global dari segi kekuatan militer, kekuatan finansial, dan penguasaan teknologi. Posisi Indonesia yang terletak tepat di tengah-tengah kawasan Indo-Pasifik membuat Indonesia harus memanfaatkan kawasan perairan sebaik-baiknya sekaligus menghadapi persaingan antar Cina dan Amerika Serikat. Di satu sisi, Indonesia menginginkan Cina untuk terus berinvestasi pada Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur serta memperkuat industri dalam negeri yang berpotensi dapat membuka lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu Indonesia berinisiatif untuk membentuk hubungan yang baik dengan Cina. Di sisi lain terlibatnya Cina di kawasan Asia Tenggara membuat stabilitas kawasan terancam, terlihat dari Cina yang menolak usulan Filipina untuk memasukkan sengketa Laut Cina Selatan ke dalam *Joint Communique* ASEAN.

Menyadari pentingnya aspek laut demi mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, geopolitik Poros Maritim Dunia lahir sekaligus menandakan bahwa Indonesia sudah terlalu lama meninggalkan laut sebagai basis utamanya. Poros Maritim Dunia lahir di tengah-tengah dinamika perpolitikan di kawasan Indo-Pasifik sebagai respons dari Indonesia yang secara

geopolitik memiliki kendali atas sumber daya alam di lautan. Presiden Jokowi, dengan geopolitik Poros Maritim Dunia memiliki lima pilar dalam rangka pengembalian identitas Indonesia sebagai negara maritim, yaitu: (1) budaya maritim, (2) ekonomi maritim, (3) konektivitas maritim, (4) keamanan maritim, dan (5) diplomasi maritim. Poros Maritim Dunia memiliki dua konsep di dalamnya yaitu konsep geografi pada kata maritim dan politik pada kata poros dan dunia. Poros Maritim Dunia memiliki tiga penafsiran yang berbeda, terutama penafsiran dari kata 'poros'. Pertama, kelompok yang memaknai poros sebagai pusat atau sumbu dalam artian memaknai Poros Maritim Dunia sebagai visi Indonesia menjadikan laut sebagai pusat aktivitas kelautan dunia. Kelompok ini menamainya *Global Maritime Fulcrum*. Kelompok kedua memaknai poros seperti apa yang dulu disebut poros Beijing-Pyongyang-Jakarta. Dalam sudut pandang kelompok kedua, ada hubungan yang ingin dibangun Indonesia dengan negara (kekuatan) lain di kawasan yang dapat membawa Indonesia mewujudkan kepentingan nasionalnya. Kelompok ini menamainya *Global Maritime Axis*. Kelompok terakhir, yaitu kelompok ketiga yang memaknai poros maritim sebagai jalur pelayaran maritim, sehingga maksud dari Poros Maritim Dunia adalah visi Indonesia untuk menguasai jalur pelayaran maritim dunia. Oleh kelompok ketiga, mereka menamainya *Global Maritime Nexus*. Pada tulisan ini, sejalan dengan determinan domestik dimana pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri seperti aspek geografis, maka Poros Maritim Dunia dalam tulisan ini memiliki makna geopolitik sekaligus menjadikan laut sebagai pusat aktivitas Indonesia.

Penulis sadar bahwa terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Sebagai contoh, tentang konsep Poros Maritim Dunia yang memiliki banyak penafsiran yang mengakibatkan kurang jelasnya definisi dari Poros Maritim Dunia itu sendiri meskipun, dalam tulisan ini, penulis menggunakan sudut pandang Poros Maritim Dunia sebagai geopolitik Indonesia dalam mengamankan jalur pelayaran yang sejalan dengan

konsep determinan domestik. Kedua, mengenai perjanjian Indo-Pasifik itu sendiri yang menurut penulis, belum terealisasi sepenuhnya karena sengketa seperti masalah Laut Cina Selatan belum menemukan titik temu sehingga sulit untuk mengatakan bahwa perjanjian Indo-Pasifik ini sudah sepenuhnya ‘berhasil’.

Namun melalui penelitian ini, terdapat temuan dari argumen konsep yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya yaitu, antara lain: Pertama, adanya faktor internal dan eksternal digagasnya perjanjian Indo-Pasifik yang erat kaitannya dengan perubahan politik luar negeri. Karena dinamika politik yang selalu berubah-ubah menyesuaikan zaman, maka perlu adanya solusi yang memadai dalam artian membuat kebijakan yang lebih modern dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada yang merujuk dari faktor internal dan eksternal tersebut. Kedua, Poros Maritim Dunia dan hubungannya dengan determinan domestik. Sejalan dengan apa yang dikemukakan Lentner mengenai determinan domestik yang mengacu pada kondisi geografis, Poros Maritim Dunia lahir sebagai geopolitik Indonesia yang letaknya strategis di Indo-Pasifik dimana Indonesia berada tepat di tengah-tengah antara samudera Hindia dan samudera Pasifik. Letak Indonesia yang strategis ini, ditambah dengan kekayaan sumber daya alam lautnya, membuat negara se-kawasan maupun negara-negara luar kawasan tertarik. Oleh karena itu sebagai negara yang memiliki kendali atas sebagian besar perairan di Asia Tenggara, Indonesia harus bisa memanfaatkan penuh lautnya demi mewujudkan negara maritim yang berdaulat tanpa campur tangan pihak luar.